

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PILKADA
DI KABUPATEN NIAS SELATAN DI MASA
PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK
PENANGANAN PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama: Titah Ndruru

NIM: 205140184

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PILKADA
DI KABUPATEN NIAS SELATAN DI MASA
PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK
PENANGANAN PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama: Titah Ndruru

NIM: 205140184

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Titah Ndruru
NIM : 205140184
Program Peminatan Profesi : Hukum Pemerintahan Negara

Judul Skripsi

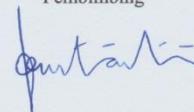
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PILKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 26 Juli 2021 dan telah dinyatakan Lulus serta diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

1. Ketua : Dr. R.M. Gatot P. S, S.H., S.E., LL.M.
2. Anggota : Vera W. S. Soemarwi, S.H. LL.M.
: Dr. Ahmad Redi S.H., M.H.

Jakarta, 30 Juli 2021

Pembimbing



(Vera W. S. Soemarwi, S.H., LL.M.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Analisis Yuridis Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nias Selatan di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Vera Wheni Setijawati Soemarwi, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Skripsi atas kesabarannya dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
7. Orangtua tercinta Bazatulo Ndruru dan Ibu Yatina Hulu atas dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orangtua harapkan.
8. Adik tercinta Farman Ndruru yang telah mensupport penulis, demi terselesaiannya skripsi ini.
9. Seluruh keluarga mahasiswa PECINTA ALAM, GEROBAK UNTAR yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga terselesaiannya skripsi ini.
10. Teman-teman FH UNTAR yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
11. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

12. Dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 27 Juli 2021

(Titah Ndruru)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II. KERANGKA TEORETIS	22
A. Teori Negara Hukum	22
B. Teori Kedaulatan Rakyat	34
C. Teori Demokrasi	40
D. Teori Pemilihan Umum	42
E. Teori Kepastian Hukum	47
BAB III. DATA HASIL PENELITIAN	53
BAB IV. ANALISIS PERMASALAHAN	67

BAB V. PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

ABSTRAK

- (A) Nama: Titah Ndruru (205140184)
- (B) Judul Skripsi: **“Analisis Yuridis Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nias Selatan di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19”**
- (C) Halaman: vii + 83 + 2021
- (D) Kata Kunci: Dampak, Pelaksanaan Pilkada, Nias Selatan, Covid-19.
- (E) Isi Abstrak
- Pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara serentak yang bertujuan terciptanya efektifitas dan efisiensi anggaran. Pilkada serentak menjadi proses pemilihan kepala daerah yang efektif, namun pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi tentunya menimbulkan masalah hukum dalam hubungannya dengan aspek kesehatan dan demokrasi. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana Pemerintah mempertimbangkan pilihan antara perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Nias Selatan dengan pergantian pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Nias Selatan dan bagaimana dampak pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nias Selatan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 di Kabupaten Nias Selatan, Pemerintah selalu mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan bagi masyarakat dengan selalu mentaati protokol kesehatan. Artinya Pilkada jangan sampai mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat yang jauh lebih penting dibandingkan pesta demokrasi dalam rangka pergantian pemilihan kepala daerah. Dampak pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nias Selatan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 meliputi dampak positif yang meliputi amanat regulasi yang berlaku tetap terlaksana, hak konstitusional peserta Pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara, mencegah pembengkakan anggaran. Sedangkan dampak negatif adalah resiko penularan COVID-19 semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan, penolakan Pilkada berpotensi meningkatkan angka golput. Upaya-upaya agar Pilkada serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik antara lain meningkatkan pengawasan protokol kesehatan, tetap menjunjung integritas dalam penyelenggaraan Pilkada, harus ada komitmen baik untuk peserta Pilkada maupun pelaksana, kedisiplinan masyarakat.
- (F) Acuan : 75 (1975-2021)
- (G) Pembimbing : Vera Wheni Setijawati Soemarwi, S.H., LL.M
- (H) Penulis : Titah Ndruru

DAFTAR SINGKATAN

Golput	adalah Golongan Putih
KPU	adalah Komisi Pemilihan Umum
PDB	adalah Produk Domestik Bruto
PPK	adalah Panitian Pemilihan Kecamatan
PPS	adalah Panitian Pemungutan Suara
TPS	adalah Tempat Pemungutan Suara
UU	adalah Undang-Undang
UUD 1945	adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945
WHO	adalah <i>World Health Organization</i>